

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Chotim, Erna Ermawati (ed.)

SOCIAL SCIENCES DEVELOPMENT

Contemporary Issues Between Indonesia and Malaysia

FISIP UNAS, 2011

15,5 em x 23 em

ISBN: 978-602-99510-0-4

© Hak Penulis dan Penerbit
Dilindungi Undang-Undang
Cetakan Pertama 2011

Editor: Erna Ermawati Chotim

Penerbit:

FISIP UNAS

Jl. Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12520

Telp. (021) 780 6700

Faks. (021) 780 2718

Daftar Isi

Daftar Singkatan	IX
Kata Pengantar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional	XIII
Kata Pengantar Dekan Sekolah Sains Sosial, Universiti Malaysia Sabah	XV
Editorial Erna Ermawati Chotim	XVII
1 Sains Sosial dalam Hubungan Dua Hala Malaysia-Indonesia Zaini Othman	1
2 Refleksi atas Teori Pembangunan Politik Hari Zamharir	19
3 Gerakan Sosial di Era Transisi ke Kapitalisme, Pengalaman Indonesia Sigit Rochadi	35
4 Pembangunan Bandar di Malaysia: Beberapa Isu Terpilih Aliakbar bin Gulasan, Mohamad Tahir Mapa, Nordin Sakke	53
5 Eksklusi Sosial dan <i>Underground Economy</i> Erna Ermawati Chotim	61

6	Stabilitas Keamanan di Daerah Perbatasan Kalimantan: Studi Awal Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Development</i>) Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur	91
	Firdaus Syam	
7	Sekali Lagi, Memahami Demokrasi	123
	Zulkarnain	
8	Gender and Transmigration: Coping Strategies of Undocumented Domestic Workers in Sabah, East Malaysia	149
	Dayang Suria Mulia	
9	Peranan Administrasi Publik dalam Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara	173
	Ani Sri Rahayu	
10	Hubungan Industri dari Perspektif Sains Sosial: Analisis Teoretis dan Praktikal terhadap Perundingan Kolektif	201
	Salmie Jemon, Kee. Y. Sabariah binti Kee Mohd. Yussof, Mahadirin Ahmad	
11	Peran Teknologi Komunikasi dalam Masyarakat	215
	Hadi Surantio	
12	Media Consumption in Malaysia: A Glimpse of Satellite TV Audience in the Interior Division of Sabah	225
	Suhaimi Salleh, Zaini Othman, Maine Suadik, Noraini Abdullah	
13	Teori dan Praktis Komunikasi dalam Evolusi Pembentukan identiti Belia Islam di Malaysia	237
	Syahrudin Hj. Awg. Ahmad, Suhaimi Salleh	

14	Aktiviti Pensejarahan Sabah: Penelitian terhadap Aspek Permasalahan dan Keperluan Sumber Lisan Bilcher Bala, Mohamad Shaukhi Md. Radzi, Sabihah Osman	251
15	Persoalan Islam dalam Hubungan Sabah-Indonesia: Penelitian terhadap Faktor-faktor Pemangkin dan Kesan terhadap Negeri Sabah Nurasnie binti Amirrudin, Mohamad Shaukhi bin Mohd. Radzi, Asmady bin Idris	269
16	Orentasi GIS dari Perspektif Sains Sosial: Pengalaman Malaysia Mustapa Abd Talip, Ruslan Rainis, Shahrudin Idrus	283
17	Situs Gelinjang: Kajian Kritis terhadap Realitas Pornografi di Internet Ellys Lestari Pambayun	301
	Para Penulis	319

•

Sekali Lagi, Memahami Demokrasi

Zulkarnain

PENDAHULUAN

Perdebatan atas terminologi demokrasi, baik dalam hal konsepsi maupun penggunaannya selalu saja menghiasi khazanah literatur yang dihadapkan kepada kita tatkala bertemu dengan berbagai tajuk tentang demokrasi itu sendiri. Demokrasi cenderung diartikan dalam konteks yang berbeda-beda dan ditafsirkan secara bervariasi dari masa ke masa. Dalam bukunya, *Democracy: A Comparative Approach*, Lane dan Ersson (2003:24) mengakuinya dengan menegaskan bahwa "*the meaning of democracy and its usage has varied over time,*" Adanya pandangan yang berbeda-beda dan bervariasi atas terminologi demokrasi ini tentu saja tidak bermaksud untuk memposisikan demokrasi tersebut dalam sudut pandang ilmiah yang skeptik. Justru sebaliknya, dalam konteks ini perbedaan pandangan atas demokrasi patut diberikan apresiasi positif, karena dengan demikian aspek dinamis ternyata menjadi lebih melekat pada konsep demokrasi itu dibandingkan dengan aspek statis, sehingga unsur *changes and continuity* yang merupakan satu dari sekian banyak prasyarat ilmiah dari sebuah ilmu pengetahuan secara nyata dimiliki oleh term demokrasi.

Pun demikian, disadari bahwa aspek ini saja tentu tidak cukup untuk membahas demokrasi secara komprehensif. Dalam konteks ini saya cenderung bersepakat dengan Sartori (1987:1), yang mengatakan *bahwa: "the*

1 Secara ringkas, Lane dan Ersson menjelaskan dalam bukunya bahwa terdapat pandangan-pandangan yang berbeda-beda tentang demokrasi, baik dari sisi konsep maupun penggunaannya. Penjelasan ini dikemukakan berdasarkan hasil studi perbandingan yang dilakukannya terhadap beberapa tulisan yang menyangkut demokrasi. Di dalam bukunya ini Lane dan Ersson mengambil dan menghadirkan sebagian kecil saja contoh dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli yang dinilai kompeten. Beberapa buku yang diteliti berdasarkan studi perbandingan itu adalah Jack Lively (1975), *Democracy*, Oxford: Blackwell; Jean Baechler (1995), *Democracy; An Analytical Survey*, Paris: UNESCO; Frank Cunningham (2002), *Theories of Democracy; A Critical Introduction*, London: Routledge. Dari perbandingan yang dilakukannya atas tiga buku ini, Lane dan Ersson menyimpulkan bahwa sesungguhnya pengertian demokrasi itu ternyata bervariasi dari masa ke masa.

concept of democracy is both diffuse and multifaceted, most participants discussing democracy have attempted to contribute with their own version of what a concept of democracy may stand for." Demikianlah bahwa pengetahuan yang rerdapat di sekitar konsep demokrasi itu adalah bersifat luas, menyebar, dan rnerniliki wajah beragam, sehingga versinya cukup banyak. Keragaman ini menjadi nyata tatkala demokrasi tersebut diarnati pada ruang empiris. Lihat misalnya pada kasus Singapura, negara itu tergolong berpenghidupan yang layak secara ekonomi, tetapi oleh banyak ahli negara itu justru tidak demokratis dalam hal sistem pemerintahannya. *"Singapore is sometimes classified as an illiberal democracy"* (Bell and Jayasuria 1995:10). Sebutan yang sarna juga berlaku pada Kuwait dan Saudi Arabia. Sementara itu, India dan Afrika Selatan memiliki persepsi yang terbalik dengan negara-negara di atas, India dan Afrika Selatan digolongkan pada negara yang memiliki tingkat demokrasi yang ringgi, sernentara kehidupan rakyatnya tergolong miskin. Khusus untuk kasus India, patut kiranya meminjam pandangan Lijpharr (1996:258), yang menyebutkan bahwa *"the combination of traditional British institutions with federalism and consociational devices has probably been conducive for democratic stability in India."*

Sebaran pengertian, keragaman wajah, dan keragaman versi atau bahkan dalam penilaian yang lebih memvonis "ketidakpastian" yang dimiliki oleh konsep demokrasi ini tentu saja tidak secara otornatis membuat kita harus meminggirkannya, melainkan sebaliknya, yaitu berusaha mengenal lebih jauh. Namun dernikian, untuk mengenali dan mengupas tuntas tentang konsep demokrasi bukanlah pekerjaan semalam dua malam. Oleh karena itu, tulisan ini akan lebih fokus pada pemaparan sederhana menyangkut bagaimanakah sesungguhnya konstruk sains dari terminologi demokrasi rersebut? *Let us start with the classical problem of defining 'democracy'.*

DEFINISI, PERGULATAN PEMIKIRAN, DAN PEMETAAN PANDANGAN ATAS KONSEP DEMOKRASI

Secara literatur, *democracy* berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni *demos* dan *cratein*, Artinya adalah pemerintahan oleh rakyat (*rule by the people*). Berdasarkan definisi ini, maka terdapat dua kata kunci dalam konsep demokrasi, yaitu *rule* (pemerintahan) dan *people* (rakyat). Bersamaan dengan itu, pernaharnan atas *rule* dan *people* sesungguhnya adalah dasar pendekatan yang dinilai paling ideal ketika melakukan inrerpretasi atas konsep demokrasi. Demokrasi yang dipahami dari sudut pandang *rule*, dapat diidentifikasi ke dalam dua konsep dasar pengertian. Pertama, dalam arti sempit; demokrasi adalah sebagai sebuah sistern pemerintahan (*democracy as a system of government*). Kedua, dalam arti luas; demokrasi adalah sesuatu yang lebih dari sekadar sebuah sistem

pemerintahan (*democracy is something more than just a system of government*). Penggolongan yang demikian ini bukan tanpa dasar. Lane dan Ersson (2003:25) saar melakukan penelitian tentang demokrasi melalui pendekatan perbandingan, secara tegas mengungkapkan bahwa:

"... when considering democracy as rule, one may identify two basic conceptions; one narrow, focussing on democracy as a system of government, and a broad conception suggesting that democracy is something more than just a system of government."

Dalam akar sejarah Yunani klasik, demokrasi itu dipahami sebagai sebuah sistem pemerintahan. Ketika Aristoteles menulis *The Politics*, di dalamnya tertera makna demokrasi. Ia menyebutkan terdapat dua kriteria yang digunakan sebagai karakteristik demokrasi, yaitu adanya sejumlah orang-orang yang menjalankan pemerintahan dan adanya pembatasan kekuasaan terhadap orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Bagi Aristotles, sebagaimana dalam *The Politics* terse but, *"democracy was not the kind of system he preferred, but for him it was basically a system of government"* (Lane and Ersson 2003:25-26). Keragaman interpretasi atas konsep demokrasi mulai muncul terutarna saat revolusi Perancis terjadi. Pengalaman dari Revolusi Perancis (1789) relah membuat pemahaman atas konsep demokrasi itu berubah. Esensi perubahan itu terletak pada ikut sertanya dimensi-dimensi non-polirik dalam memahami gagasan demokrasi. Inrinya, keterkaitan dimensi ekonomi dan ru ntuta n atas persamaan hak-hak masyarakat mencuat ke permukaan mengiringi pemahaman atas konsep demokrasi. Semenjak periode ini, pemahaman atas konsep demokrasi cenderung mengalami perluasan makna yang pada dasarnya adalah meyakini demokrasi sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar sistem pemerintahan. Laski (1931:77) membenarkan hal ini dengan menegaskan bahwa *"at the time of the French Revolution one may say that economic equality became 'a permanent part of the democratic creed'"*. Munculnya aspek persamaan hak-hak ekonomi dalam pemaknaan demokrasi-bahkan Laski mempertegasnya dengan menyatakan kalau aspek ini sudah merupakan bagian permanen dari keyakinan demokrasi-menandakan bahwa demokrasi itu sendiri tidaklah idenrik dengan sistem pemerintahan sernata. Pendeknya, pengalaman Revolusi Perancis telah menjadi semacam acuan faktual yang cenderung melegalisasi munculnya pendapat-pendapat baru mengenai demokrasi. Pengakuan lain dapar dilihat dari pendapat Naess, er. al. (1956:130), yang menyatakan bahwa sejak pertengahan abad ke-19, *"democracy 'first of all implied social equality"*. Demikianlah bahwa konsepsi demokrasi sesungguhnya sejak lama relah ditafsirkan dalam arti

yang berbeda dengan makna aslinya sebagaimana dalam perspektif Athena klasik.

Salah satu pemikir yang kerap dijadikan sebagai basis terhadap munculnya tafsir baru konsep demokrasi ini dipelopori oleh Alexis de Tocqueville. Hal ini bermula dari pertanyaannya tentang *how a democracy operates in real life?*² Kemudian jawaban atas pertanyaan ini dianggap sebagai pemicu dalam memporakporandakan konstruksi konsep demokrasi dan pada akhirnya mendorong munculnya pemaknaan-pemaknaan baru atas konsepsi demokrasi itu. Tocqueville adalah seorang teoretisi terkemuka yang secara nyata mengidentifikasi bahwa demokrasi itu berkaitan erat dengan persamaan hak-hak masyarakat, sekalipun tidak sedikit yang menentangnya.

Lively (1962:49) mengatakan bahwa penggunaan konsep dasar yang mempertautkan demokrasi di satu sisi dengan persamaan hak di sisi lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Tocqueville seringkali ambigu. Dalam bukunya yang lain, Lively (1975:65) juga mengkritik pedas pandangan Tocqueville ini, ia mengemukakan bahwa:

"Clearly, attempts such as these to relate political to socio-economic development are not novel. Equally clearly their intuitive and discursive historical case cannot satisfy the demands of those who would construct a new empirical theory of democracy."

Secara jelas Lively mengatakan bahwa apa yang ditemukan oleh Tocqueville berdasarkan pengalaman sejarah demokrasi empiris yang terjadi di Amerika Serikat, sebagaimana dalam bukunya *La Democratie en Amerique 1835-40*, tidak dapat diuji secara ilmiah. Hipotesisnya yang membenarkan adanya hubungan keterkaitan yang kuat antara dimensi politik di satu sisi dengan dimensi sosial-ekonomi di sisi lain, justru tidak dapat memberikan uji hipotesis yang akurat. Bagi Lively, hipotesis Tocqueville berdasarkan pengalaman sejarah demokrasi empiris di Amerika Serikat hanyalah memaparkan serangkaian cerita roman. Seterusnya, Lively (1975:65-66) menambahkan bahwa *"any hypothesis about the relationship between socio-economic factors and democracy should be quantifiable; we cannot speak of*

² Tocqueville memberikan pertanyaan ini dalam bukunya yang ditulis dalam bahasa Perancis volume kedua, *La Democratie en Amerique 1835-40*. Uniknya Tocqueville justru meneliti sistem demokrasi itu bukan di negara asalnya Perancis, melainkan di Amerika Serikat yang kala itu memang sedang diterapkan. Dari buku yang ditulisnya itu terdapat dimensi-dimensi baru yang dinilai penting dalam serangkaian kajian demokrasi. Salah satu di antaranya adalah lahirnya konsep *democratic stability*. Hingga kini, konsep baru yang dilahirkan oleh Tocqueville ini banyak dijadikan sebagai indikator penting oleh para penstudi demokrasi, ketika mengkaji perihal demokrasi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang isi buku ini, dapat dilihat pada bagian pengantar dari buku Lane dan Ersson (2003), *Democracy: A Comparative Approach*, London: Routledge, h. 1-20.

what we cannot test, and we cannot test what we cannot number." Lively ingin menyampaikan bahwa hasil-hasil temuan Tocqueville itu adalah lemah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sekalipun banyak ahli yang meragukan tesis Tocqueville itu, tidak sedikit pula yang memihak kepadanya. Christophersen (1968:86) adalah satu di antara sekian banyak ahli yang secara tegas mendukung Tocqueville, ia menyebarkan bahwa:

"There is no-doubt that, for him, democracy was something more than a system of government. Particularly before 1848, one may find a rather strong association and even identification of social equality with what was called 'democracy'."

Dalam hal ini Christophersen menegaskan bahwa tidak ada keraguan bahwa demokrasi sesungguhnya adalah sesuatu yang lebih dari hanya sekadar sistem pemerintahan. Secara faktual, memang ditemukan adanya hubungan yang kuat antara faktor persamaan hak-hak sosial-ekonomi di satu sisi dengan demokrasi di sisi lain sebagaimana hasil-hasil temuan Tocqueville. Dewey (1966:87) memperkuat kondisi yang demikian ini dengan menegaskan bahwa *"democracy is more than a form of government, it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience."* Hal senada juga dikemukakan oleh Laski. Ia menyebutkan bahwa pengalaman sejarah politik sebagaimana yang terjadi di Eropa pasca abad pertengahan yang ditandai dengan munculnya peristiwa Revolusi Industri adalah serangkaian determinan yang pada akhirnya memperkuat dugaan bahwa dimensi sosial-ekonomi bertautan dengan demokrasi. Laski (1931:84) mengemukakan bahwa *"for the average man constitutional government is not less important in industry than in politics or any other sphere."* Laski mengakui bahwa serangkaian peristiwa revolusi industri yang terjadi di Eropa telah melahirkan serangkaian tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap perlunya persamaan hak-hak sosial-ekonomi dalam kehidupan politik yang dijalankan di atas format pemerintahan demokrasi.

Dua pandangan yang saling berolak belakang dalam melihat makna demokrasi ini, telah menjadi basis bagi munculnya perdebatan yang cukup tajam di kemudian hari yang terjadi di antara para ahli-politik, terutama mereka yang menaruh perhatian terhadap studi demokrasi. Bahkan hingga saat ini, dua pandangan tersebut tetap saja mengemuka dan senantiasa mewarnai berbagai diskursus dan analisis tentang demokrasi.

3 Pandangan pertama menyebutkan bahwa demokrasi *"as a system of government"*, dan pandangan kedua menyebutkan bahwa demokrasi *"is something more than just a system of government"*.

Apalagi konsep demokrasi itu *in-charge* ke dalam berbagai pengalaman empiris beberapa negara.

Dalam posisi yang hampir mirip tetapi lebih radikal, justru ditunjukkan oleh beberapa pakar ketika mereka juga turut memahami demokrasi itu. Sebut saja misalnya MacPherson, ia mengatakan bahwa demokrasi tidak saja berbicara persamaan hak-hak sosial, politik, dan ekonomi, melainkan juga dapat diperraurkan dengan dimensi kebebasan yang mencakup berbagai hal. Dalam pandangan MacPherson (1972:53), "*democracy in the broad sense requires not just equality but also freedom from starvation, ignorance and early diseased death*" Bebas dari derita kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari ragam penyakit yang mernatkan, adalah serangkaian aspek baru yang ditekankan dan dinilai penting oleh MacPherson tatkala menghampiri demokrasi dalam setiap diskursus dan/atau analisisnya. Dalam buku yang lain, MacPherson (1973:51) juga menyebutkan bahwa:

"As soon as democracy is seen as a kind of society, not merely a mechanism of choosing and authorizing governments, the egalitarian principle inherent in democracy requires not only 'one man, one vote', but also 'one man, one equal effective right to live as fully humanly as he may wish.'"

Dalam pandangan MacPherson, demokrasi haruslah dilihat sebagai bagian dari kehidupan sosial, tidak melulu kekuasaan dan sebuah mekanisme pemilihan dalam lingkup tata pemerintahan. Baginya, demokrasi tidak hanya dilihat dalam konteks satu orang satu suara, melainkan haruslah dikaitkan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang egaliter, mementingkan persamaan hak, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana keinginan-keinginan masyarakatnya.

Pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Christophersen, Dewey, dan MacPherson sebagaimana telah dipaparkan di atas, ternyata mendapat respons yang bernada kontra dari penstudi demokrasi lainnya. Beberapa ahli seperti James Bryce, menolak pandangan-pandangan tersebut di atas. Ia menyarakn bahwa diskursus demokrasi adalah diskursus yang hanya terkait dengan bentuk pemerinrahan, tidak dapat dikaitkan dengan persamaan hak-hak ekonomi. Dalam uraiannya, Bryce (1921:76) mengemukakan bahwa:

"Democracy-which is merely a form of government, not a consideration of the purposes to which government may be turned- has nothing to do with economic equality, which might exist under any form of government, and might possibly work more smoothly under some other form."

Opini lain yang dianggap mempunyai penilaian yang hampir sama dengan Bryce ini ditunjukkan oleh Ernest Barker. Ia menyebutkan bahwa demokrasi tidak dapat diartikan dan dibawa-bawa kepada aspek kesejahteraan sosial. Sirkalah pernyataannya ini dengan menyebut bahwa:

"Democracy does not mean the well being or prosperity of the people, and a democratic measure is a measure which originates from, or tends to promote, such a method of government -not a measure which tends to increase the amount or to rectify the distribution of prosperity or well-being." (Barker 1932:315)

Bagi Barker, demokrasi adalah metode pemerintahan dan untuk mengukurnya tidak dapat dilakukan dengan hal-hal distribusi kesejahteraan atau yang sejenis dengan itu, melainkan adalah dengan aspek tara penyelenggaraan pemerintahannya. Brian Barry juga memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa demokrasi itu haruslah dipahami dalam terminologi prosedural. Ia menolak dengan tegas apabila terdapat berbagai gagasan yang dimasukkan ke dalam bangunan konsep demokrasi itu. Penegasan ini dapat dilihat ketika Barry (1989:25) mengatakan bahwa *"I reject the notion that one should build into democracy any constraints on the content of the outcomes produced, such as substantive equality, respect for human rights and concern for the general welfare, personal liberty or the rule of law."* Pendirian Barry yang cenderung kokoh mempertahankan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan ini merupakan bentuk lain dari maraknya khazanah perdebatan di antara beberapa ahli penstudi demokrasi.

Sekelompok nuansa perdebatan antar para ahli sebagaimana telah dipaparkan di atas, secara nyata baru memfokuskan objek perdebatannya pada dimensi *'cratin'* (*rule*) yang terdapat di dalam konsep demokrasi. Lalu bagaimana pula mereka memandang dimensi *'demos'* (*people*) yang juga terdapat di dalam konsepsi demokrasi itu?

Dapat dipastikan bahwa perdebatan pada aspek *people* tidaklah seheboh aspek *rule* yang faktanya memang lebih ramai dalam hal gagasan. Makna *demos* dan/atau *people* dalam konsep demokrasi merujuk kepada klasifikasi, jumlah, dan status kependudukan yang dimiliki oleh rakyat dalam sebuah negara. Dalam Yunani Klasik, yang dimaksud dengan rakyat itu adalah *"only the free men were allowed to be included into the 'demos'" (2003:27)*. Sebutan *free men* dapat dikategorikan sebagai penduduk laki-laki dewasa yang berada dalam wilayah hukum negara. Mayo (1965:43) mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa *"the resident foreigners (outlanders or metics), women, children and slaves were all excluded."* Pengertian *demos*

di atas adalah untuk ukuran Yunani Klasik, tetapi dalam perkembangan berikutnya ukuran tersebut sudah bergeser dan para ahli banyak yang menyetujui pergeseran itu. *Demos* untuk ukuran kekinian meliputi juga penduduk perempuan dewasa, lalu kemudian meliputi juga para migran yang menumpang dan menetap di wilayah hukum negara bersangkutan. Menurut Dahl (1989:127), "*a member of the demos is every adult subject to a government and its laws must be presumed to be qualified as, and has an unqualified right to be.*" Kemudian Dahl menegaskan lagi bahwa terdapat dua kesulitan apabila menggunakan prinsip ini sebagai ukuran *member of demos*. Pertama adalah memberikan batasan antara usia anak-anak dan orang dewasa yang tergolong sebagai penduduk. Kedua adalah menyangkut penduduk pendatang dalam sebuah negara, apakah mereka termasuk sebagai anggota *demos* atau tidak. Dalam praktiknya kesulitan-kesulitan ini ternyata lebih mudah mendapatkan konsensus di kalangan para ahli. Dengan mengedepankan kebijakan atau strategi legal kependudukan sebagai metode penentuannya, para ahli politik dan negarawan cenderung tidak terlalu mengalami kesulitan ketika merespons dimensi *demos* ini.

Kembali kepada ragam perbedaan pandangan tadi, sejauh ini kita telah mengidentifikasi bahwa terdapat dua sudut pandang ketika mendefinisikan demokrasi, yaitu demokrasi dalam arti sempit dan demokrasi dalam arti luas. Mereka yang mendefinisikan demokrasi adalah sebagai sebuah sistem pemerintahan, tergolong kepada orang-orang yang melihat dan menaruh perhatian demokrasi dalam arti sempit. Sebaliknya, mereka yang mendefinisikan demokrasi lebih dari sekadar sistem pemerintahan, tergolong kepada orang-orang yang melihat dan memahami demokrasi dalam arti luas. Kelompok yang mewakili dua kutub yang berbeda sama lain ini senantiasa tarik-menarik dan telah menjadikan 'demokrasi' sebagai sebuah konsep yang berada dalam ruang kebimbangan. Pandangan pro dan kontra yang selalu menghampiri konsep demokrasi itu seakan telah menjadi standar baku bagi status demokrasi sebagai sebuah konsep. Bahkan, hingga sekarang pun iri perdebatan masih saja terus mengiringi eksistensi dan bangunan konsep demokrasi itu, Apakah kemudian gagasan dan pandangan baru atas demokrasi sudah berhenti mengalir tatkala dua kutub di atas saling menunjukkan taring keberadaannya?

Demikianlah bahwa di tengah-tengah pro dan kontra itu bermunculan pula serangkaian gagasan-gagasan baru dalam bentuk lain yang berusaha mencoba menempatkan dirinya pada posisi yang lebih moderat. Bahkan tidak jarang di antaranya berani memposisikan pandangan-pandangannya pada pijakan yang lebih pragmatis. Tetapi intisari yang dapat ditarik dari raraknya kemunculan pandangan-pandangan baru itu adalah memandang demokrasi sebagai sesuatu yang lebih dari hanya sekadar sistem pemerintahan belaka. Interaksi antara demokrasi di satu sisi dengan

faktor-faktor sosial-budaya dan ekonomi di sisi lain telah menjadi ciri khas dari kebanyakan gagasan baru yang muncul mengiringi pemaknaan demokrasi pada perkembangan selanjutnya. Bahkan penyertaan dimensi 'pembangunan' yang kerap disandingkan dengan 'gagasan ideal demokrasi' telah menjadikan diskursus demokrasi semakin berwarna. Artinya, dalam memahami demokrasi, basis pemaknaan yang lebih luas (*broad conception*) kerap dijadikan sebagai sudut pandang bagi munculnya pemahaman baru tentang gagasan demokrasi. Hanya saja perlu disampaikan bahwa pandangan-pandangan baru yang muncul atas konsep demokrasi tersebut cenderung lebih menempatkan aspek rasionalitas dan empirikal ketimbang aspek-aspek yang non-ilmiah. Penyertaan variabelitas dalam menganalisis, penguatan pengukuran, dan pengajuan prasyarat kerap dijadikan sebagai instrumen bagi penggagas baru ketika mereka memaknai demokrasi. Varsheny (1999:12), membenarkan hal ini dengan menyatakan bahwa:

"Prom an analytical point of view, it is necessary to distinguish between democracy as a procedure and economic equality as an outcome. If not, it ends up conflating the explanandum and explanans, or to put it differently, the independent and dependent variables."

Przeworski (1999:23) menyebut hal ini serupa dengan konsep minimalis dalam memahami demokrasi. Dalam hal ini Przeworski meyakini bahwa demokrasi telah didekari dengan mengedepankan pentingnya pengukuran konsep dan menernpatkan faktor-faktor pendorong bagi munculnya demokrasi.

Mengikuti penjelasan Varsheny dan Przeworski, Schmidt dan Brooker juga menyebutkan bahwa pemahaman atas demokrasi telah ditinjau kembali, tujuannya adalah untuk mengetahui dan memetakan mengapa ada sistem politik negara yang demokratis dan tidak demokratis serta untuk mengetahui tingkatan demokrasi pada sebuah negara. Schmidt dan Brooker dengan jelas mengemukakan bahwa *"defining democracy is important for discriminating between democratic and non democratic political systems, but also for attempts to map a variation in the degree of democracy"* (Lane and Ersson 2003:27).⁴ Apa yang dikemukakan oleh para penstudi teori demokrasi ini merupakan bagian sistematis dari maraknya upaya-upaya para ahli untuk memperkuat pemahaman dan landasan teoretis atas gagasan demokrasi. Oalam kerangka ini pulalah kemudian gagasan ideal demokrasi itu mendapat bobot yang lebih ilmiah. Di sam pihak gagasan demokrasi dipahami dalam konteks prosedur, di lain pihak dipahami dalam

⁴ Pendapat Manfred G. Schimidt (2000) dan Paul Brooker (2000) ini dapat dilihat pada buku yang ditulis oleh Lane dan Ersson (2003). *Democracy: A Comparative Approach*. London: Routledge. h. 27.

konteks non-prosedur.' Berikut ini akan dijelaskan apa dan bagaimana gagasan ideal demokrasi tersebut berdasarkan pada konteks prosedur dan non-prosedur tadi, sehingga ditemukan adanya aktivitas penguatan atas konstruksi konsep demokrasi melalui teorisasi demokrasi.

KERANGKA TEORI

Membangun teori demokrasi bukanlah perkara mudah. Sebab basis dan asumsi yang mengiringi pandangan-pandangan atas gagasan demokrasi cenderung memiliki variasi yang beragam, tergantung pada sudut pandang mana demokrasi itu dipahami. Itulah sebabnya teori-teori demokrasi juga berada pada posisi dalam mana struktur bangunannya kurang kokoh. Tidak mengherankan bila kemudian banyak pihak yang menilai bahwa demokrasi itu mengecewakan. Dalam kaitan ini, MacPherson (1972:1) mengatakan bahwa demokrasi seringkali mengecewakan. Bahkan Dorothy Pickles (1970:23) berani menegaskan bahwa tidak ada demokrasi yang sempurna. Demikianlah bahwa posisi sains yang melekat pada konsep demokrasi memang cenderung rentan. Tidak salah bila kemudian Przeworski menyebutnya sebagai *minimalist conception*, artinya konsep yang bobot ilmiahnya kurang maksimal dan penerimaan universalnya masih rendah. Bisa jadi sebutan *pre-theory* justru lebih tepat disandang oleh konsep demokrasi ini. Sekalipun demikian, bukan berarti aktivitas reorisis terhadap konsep demokrasi sepi dari sentuhan-sentuhan rasionalitas para ahli.

5 Pemilahan atas nama konteks prosedur dan non-prosedur ini diperoleh dari pemaknaan dan interpretasi penulis atas uraian yang disampaikan oleh Lane dan Ersson (2003), *Democracy: A Comparative Approach*, London: Routledge, h. 27-66. Namun demikian, untuk mempermudah dan menyederhanakan pemahaman, penulis menilai bahwa penggunaan sebutan ini pada dasarnya sama saja dengan melihat demokrasi dalam konteks substansi dan proses di satu sisi dan melihat demokrasi dalam konteks tujuan di sisi lain. Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa pihak-pihak yang memahami demokrasi dalam konteks prosedur/substansial atau dalam konteks proses adalah mereka yang memposisikan dirinya moderat, sedangkan mereka yang memahami demokrasi dalam konteks tujuan atau non-prosedural adalah pihak-pihak yang memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang pragmatis dalam memahami demokrasi. Selanjutnya berdasarkan alur pemetaan pemikiran sebagaimana sudah diterangkan pada awal-awal tulisan ini, mereka yang memahami gagasan demokrasi dalam konteks prosedur adalah orang-orang yang cenderung memiliki akar pandangan yang mendekati dan memandang demokrasi as a *system of government*, sedangkan mereka yang memahami gagasan demokrasi dalam konteks non-prosedur adalah orang-orang yang cenderung memiliki akar pandangan yang mendekati dan memandang demokrasi sebagai *something more than just a system of government*. Pada kesempatan ini patut dipertegas bahwa pemilahan semacam ini tidaklah dimaksudkan untuk saling mendeskreditkan antara satu pihak dengan pihak lain. Pemilahan ini tidak berkehendak untuk memvonis bahwa keilmiahannya satu pihak lebih unggul dari pihak yang lain atau sebaliknya.

TEORI DAN PENGUKURAN DEMOKRASI (DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI SEBAGAI SEBUAH SISTEM PEMERINTAHAN)

Sebuah kesimpulan yang patut dihargai dalam rangka merumuskan teori demokrasi, berasal dari Lane dan Ersson ketika mereka melakukan survei kepustakaan terhadap sejumlah definisi-definisi demokrasi. Survei yang mereka lakukan menghasilkan tesis, bahwa terdapat serangkaian aspek-aspek pokok dalam konsep demokrasi. Lalu untuk menerapkannya perlu memperhatikan berbagai prosedur. Selengkapnya, Lane dan Ersson (2003:27-28) mengemukakan bahwa:

"Democracy means rule of the people, but to have a democracy there must be a set of procedures which enhance; (a) contestation between political alternatives, (b) citizens participating in political life, and (c) real guarantees for the existence of political liberties."

Teori demokrasi yang dikembangkan oleh Lane dan Ersson ini menernpakan persaingan, partisipasi, dan jaminan kebebasan berpolitik sebagai unsur utama dalam demokrasi.

Sementara itu, Dahl (1963:3) menekankan bahwa intisari demokrasi adalah *"processes by which ordinary citizens exert a relatively high degree of control over leaders."* Arus utama definisi demokrasi yang dikembangkan oleh Dahl ini adalah adanya pengawasan ketat dari rakyat terhadap elite pemerintah yang berkuasa. Tipikal definisi yang hampir senada juga dikemukakan oleh Huntington (1991:7), ia menyatakan bahwa demokrasi itu adalah:

"Political system as democratic to the extent that its most powerful collective decision makers are selected through fair, honest and periodic elections in which candidates freely competes for votes and in which virtually all the adult population is eligible to vote."

Selanjutnya, rnodifikasi definisi yang lebih minor dapat diterukan pada pendapat yang dikemukakan oleh Markoff. Ia menyebutkan bahwa secara umum demokrasi memiliki tiga dimensi utama, yakni *"contestation, participation, civil and political freedoms"* (Markoff 1999:662-663). Randall Collins menawarkan definisi yang sedikit berbeda. Ia menyebutkan bahwa demokrasi itu terdiri dari tiga dimensi penring, yaitu *"degree of collegially shared power, extent of the participatory franchise and political rights"* (1998:14). Berikutnya adalah definisi yang ditawarkan oleh Lipser (1995:

iv), menurutnya demokrasi adalah sistem yang di dalamnya mengandung tiga unsur, yaitu:

"First, competition exist for government positions, and fair elections for public office occur at regular intervals without the use of force and without excluding any social group. Second, citizens participate in selecting their leaders and forming policies, Third, civil and political liberties exist to ensure the integrity of political competition and participation."

Dari beberapa teori demokrasi yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa demokrasi pada dasarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah sistem pemerintahan. Namun demikian, patut juga dipahami bahwa demokrasi haruslah dilihat dalam konteks realitas politik aktual, Karena sistem pemerintahan demokrasi tidaklah secara universal berjalan mulus carakala ia diterapkan pada ruang empiris. Dalam konteks ini, barangkali kita perlu bersepakat dengan MacPherson. Ia mengemukakan bahwa demokrasi tidak akan begitu mudahnya berkembang dalam realitas politik aktual. Demokrasi baru bisa 'disemaikan' jika telah tersedia 'lahan' yang memang kondusif bagi pertumbuhannya. Kemudian, Macpherson (1972:5) melanjutkan lagi dengan menyatakan bahwa lahan yang subur untuk perkembangan demokrasi yang perlu disiapkan adalah penyelenggaraan masyarakat yang bersaing, individualis dan berorientasi pasar, serta terselenggaranya negara liberal:

Sejauh ini kita telah tiba pada pemahaman demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang di dalamnya melekat prosedur-prosedur yang terdiri dari *contestation, participation, and civil and political liberties*. Kemudian kita juga sudah tiba pada pemahaman bahwa demokrasi itu membutuhkan berbagai kriteria agar bisa tumbuh dan berkembang. Kriteria-kriteria di atas mungkin saja dikembangkan tidak hanya untuk menencukan apakah sebuah rezim pemerintahan itu demokratis atau tidak demokratis, tetapi juga dapat dijadikan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan menyangkut pada tipe-tipe atau model-model demokrasi. Namun demikian, untuk sampai pada taraf ini, maka kita perlu melakukan pengukuran demokrasi terlebih dahulu (*measuring democracy*).

Mendefinisikan batasan demokrasi sebagai sebuah konsep telah dilalui, seterusnya aktivitas pengukuran adalah hal berikut yang perlu dilakukan. Secara umum, mengukur konsep merupakan bagian penting dari sebuah pemaparan ilmiah. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana konsep demokrasi diukur, sehingga konsep tersebut memiliki kemampuan dan kelayakan ketika bergulir pada ruang empiris. Dalam berbagai pandangan yang berpengaruh, pengukuran demokrasi diletakkan pada dua kategori

isu. Perrarna, pengukuran konsep demokrasi yang berbasis pada dikotomi (*dichotomy*) dan kedua, pengukuran yang berbasis pada skala berkelanjutan (*continuous scale*). Jika pengukuran itu berbasis pada skala dikotomi, maka hasilnya adalah munculnya perbedaan antara negara demokrasi di satu sisi dan negara yang non-demokrasi di sisi lain. Sementara itu, jika pengukuran itu berbasis pada skala berkelanjutan, maka hasilnya adalah munculnya negara-negara yang memiliki tingkat demokrasi yang bervariasi.

Pandangan lain yang dianggap berpengaruh dalam konteks pengukuran demokrasi ini dapat kita lihat dari perspektif *objective measures* dan *subjective measures*. Pandangan ini lebih menekankan pada pentingnya pemberian angka-angka berupa indeks terhadap pelaksanaan sistem demokrasi. Dasar pengukuran yang digunakan mengacu pada keseluruhan indikator-indikator kunci yang dinilai melekat erat dalam konsep demokrasi itu sendiri. Berikut ini mari kita lihat beberapa ahli yang kerap menggunakan basis-basis di atas ketika mengukur demokrasi dalam setiap analisis-analisis yang dilakukannya, baik mereka yang berbasis pada skala pengukuran dikotomi-keberlanjutan maupun mereka yang berbasis pada skala pengukuran objektif-subjektif.

Huntington, ketika melakukan analisis terhadap studi demokrasi cenderung menggunakan pendekatan dikotomi. Lihat misalnya, yang ia lakukan seperti terdapat dalam bukunya *The Third Wave*. Huntington menegaskan dalam bukunya bahwa terdapat negara-negara yang demokratis dan tidak demokratis. Baginya negara-negara dunia ketiga cenderung tidak demokratis dan negara-negara maju cenderung demokratis (Huntington 1991:11). Tidak jauh berbeda dengan Huntington, Przeworski juga kerap memberikan hasil pengukuran tersebut dalam dua klasifikasi yang berbasis pada ukuran dikotomi, sekalipun pada setiap analisisnya terdapat sejumlah analisis yang berbentuk angka-angka. Klasifikasi demokrasi yang diajukan Przeworski tersebut terdiri dari negara-negara yang demokratis dan negara-negara yang non-demokratis, Lihat misalnya, dalam buku *Democracy and Development* yang ditulis secara bersama-sama dengan kawan-kawannya. Bagi Przeworski, et.al. (2000:57) negara-negara yang demokratis itu terdiri dari sistem rezim pemerintahan parlementerisme, presidensialisme, dan campuran antara keduanya. Sedangkan negara-negara yang non-demokratis terdiri dari sistem rezim pemerintahan autokrasi dan birokrasi.

Para ahli yang cenderung menekankan dimensi pengukuran konsep demokrasi atas basis pendekatan skala berkelanjutan dapat kita lihat pada analisis demokrasi yang kerap dilakukan oleh Bollen. Ia menyatakan bahwa "*democracy is always a matter of degree; the concept of political democracy is continuous. We talk and think about the degree to which democracy is present*" (Bollen 1990:15). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Elkins (2000:287-294), ia menyebutkan bahwa "*democratization studies, lead us to believe that*

there is substancial variation in the degree of democracy acrossboth time and space."

Pengukuran konsep demokrasi yang mengacu pada pengutamaan skala pengukuran objekrif-subjekrif dalam setiap analisisnya, dapat kita lihat sebagaimana yang kerap dilakukan oleh beberapa ahli. Vanhanen misalnya, selalu menggunakan indeks untuk mengukur indikator sistem demokrasi yang diterapkan di beberapa negara. Menurutnya, pengukuran demokrasi yang berbasis dimensi objektif merujuk pada jumlah keikutsertaan parpol dalam pemilu dan jumlah prosentase populasi yang ikut serta dalam pemilu. Dua indikator ini merupakan komponen inti indeks demokrasi yang dikembangkan oleh Vanhanen. Seterusnya, pengukuran demokrasi yang berbasis dimensi subjektif merujuk pada penggunaan *rating* atau pemberian angka berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh si pemberi angka terhadap aspek kebebasan dan hak-hak politik sipil, serta penilaian terhadap kejujuran dan keadilan penyelenggaraan pemilu (Vanhanen 2000:251-265). Basis pengukuran demokrasi yang dikembangkan oleh Bollen dan Vanhanen ini kemudian mempengaruhi R.D. Gastil ketika melahirkan Freedom House, yakni sebuah kelompok panel ahli yang secara khusus menyoroti pelaksanaan demokrasi di beberapa negara. Sebagaimana diketahui, Freedom House secara berkala setiap tahunnya selalu melaporkan indeks demokrasi negara-negara di dunia.

Dalam mengukur tingkat demokrasi suatu negara, para penilai terdiri dari mereka yang bekerja secara *individual scholars, a group of scholars or a panel of experts*. Vanhanen dan Bollen adalah mereka yang bekerja secara individual dalam mengukur tingkat demokrasi suatu negara dan melaporkannya kepada publik dalam bentuk angka-angka berdasarkan kurun waktu yang sifatnya *multiple time period*. Freedom House tergolong panel ahli yang bekerja secara kelompok dalam mengukur tingkat demokrasi suatu negara dan melaporkannya kepada publik dalam bentuk angka-angka berdasarkan kurun waktu yang sifatnya *single time periods*. Pengukuran tingkat demokrasi lainnya dapat kita lihat seperti yang ditawarkan oleh The Polity serta Przeworski dan rekan." Dua kelompok terakhir ini adalah mereka yang tergolong pada jenis *group of scholars* ketika bekerja dalam mengukur tingkat demokrasi di beberapa negara. Dua kelompok terakhir

6 The Polity terdiri dari penstudi demokrasi yang mengukur tingkat demokrasi berdasarkan klasifikasi rezim pemerintahan sebagaimana yang diajukan oleh Przeworski dan rekan. Laporan publik yang dikeluarkan oleh The Polity dapat dilihat pada Ted Robert Gurr dan Keith Jagers (2000), "Polity98 Project; Regime Characteristics 1800-1998" dalam <http://www.bsos.umd.edu/cidcm/polity/>. Sedangkan laporan publik menyangkut tingkat demokrasi suatu negara yang berasal dari Przeworski dan rekan dapat dilihat pada Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub and Fernando Limongi (2000).

ini menggunakan pelaporan tingkat demokrasi negara-negara berdasarkan kurun waktu yang sifamya *multiple time periods*.

Kecuali Huntington, keseluruhan nama-nama para ahli di atas yang bekerja ketika mengukur demokrasi pada negara-negara yang disurveinya, menggunakan angka interval dari 0 sampai 10 untuk menentukan karakteristik tingkat demokrasi sebuah negara. Hanya saja penentuan intervalnya bervariasi di antara para ahli, baik yang bekerja secara individual maupun kelompok.

TEORI DAN PENGUKURAN DEMOKRASI (DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI SEBAGAI SESUATU YANG LEBIH DARI SEKADAR SISTEM PEMERINTAHAN)

Dalam pemikiran politik, terdapat pemahaman umum yang menyatakan bahwa sebuah rezim politik yang menganut sistem pemerintahan tertentu di sebuah negara mempunyai hubungan positif dengan tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan sosial yang dialami oleh rakyat di negara bersangkutan dalam mana sistem pemerintahan itu dijalankan. Basis pemikiran politik yang demikian ini dapat dilihat dari pemikiran Arisrorles. Dalam: pandangan Aristodes (1981:271), rakyat sangat mengharapkan terjadinya kemakmuran, tidak peduli apakah pemerintahannya dipimpin oleh rezim politik demokrasi atau oligarki. Pandangan Aristotles yang demikian ini merupakan salah satu *mainstream* berpengaruh dalam pemikiran-pemikiran politik. Maciver, seorang ahli politik terkemuka cenderung bersepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Aristotles di atas. Ia menyatakan bahwa negara-negara tertentu selalu mempromosikan budaya dan mengembangkannya ke arah demokrasi. Dalam hal ini demokrasi dapat berkembang pada beberapa negara tertentu karena karakter budaya yang dimilikinya (Maciver 1965:142). Lipset bahkan mengklaim bahwa ia telah berhasil menunjukkan hubungan yang positif antara kesejahteraan dengan demokrasi. Secara khusus Lipset (1963:48-50) menyebutkan bahwa "*perhaps the most common generalization linking political systems to other aspects of society has been that democracy is related to the state of economic development.*"

Mekanisme keterkaitan antara faktor kesejahteraan di satu sisi dengan demokrasi di sisi lain dapat dilihat dari formasi kelas menengah dalam masyarakat ..Pertumbuhan kesejahteraan menjadi meningkat oleh karena adanya investasi berlebihan dalam srukrur sosial masyarakat. Salah satu jenis investasi itu adalah dimensi pendidikan yang dijadikan sebagai modal sosial. Dimensi pendidikan dapat mendorong munculnya orientasi-orientasi baru di kalangan masyarakat. Semakin banyak jumlah orang yang mengenyam pendidikan, maka semakin banyak pula tercipta kelas

menengah baru di kalangan masyarakat. Dengan semakin banyaknya tercipta kelas menengah baru, maka hal ini akan sangat kondusif untuk mengurangi polarisasi dalam kehidupan politik. Berkurangnya polarisasi dalam struktur masyarakat sebagai akibat semakin banyaknya masyarakat terdidik, kemungkinan besar akan mempermudah munculnya perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan politik non-dernokratis. Dengan demikian, stabilitas demokrasi lebih terjamin. Pandangan-pandangan yang demikian ini tergolong pendekatan modernisasi dalam ilmu politik. Para ahli yang memihak pada pendekatan sejenis ini meyakini bahwa transisi demokrasi bisa terjadi dalam jangka panjang.

Oleh para penstudi demokrasi, paradigma Lipset ini sering dijadikan sebagai acuan untuk menghasilkan berbagai tesis yang menyatakan bahwa dimensi kesejahteraan atau kemakmuran berkaitan erat dengan demokrasi. Dukungan atas tesis Lipset ini bisa kita lihat seperti apa yang dikemukakan oleh Diamond, yang pernah melakukan survei terhadap kajian-kajian kepustakaan berpengaruh dalam bidang studi sejenis ini dari tahun 1960-an sampai 1980-an. Diamond (1992:470) secara tegas menyatakan bahwa terdapat efek-efek positif dalam demokrasi. Tesis Diamond seperti ini pada dasarnya membenarkan apa yang diungkapkan oleh Lipset (1963:485) ketika ia mengatakan bahwa "*broadly correct in his assertion of a strong causal relationship between economic development and democracy and his explanations of why developments promotes democracy.*" Dalam konteks ini, baik Lipset maupun Diamond, cenderung membenarkan bahwa pembangunan adalah faktor dominan dalam penciptaan -dernokrasi, Baginya, aspek pembangunan sangat berpeluang mempromosikan demokrasi.

Dalam perkembangannya, tesis Lipset yang demikian ini ternyata mendapat tantangan dari O'Donnell' ketika ia meneliti demokratisasi yang dijalankan oleh beberapa negara di kawasan Amerika Latin pada tahun 1970-an. Dalam penelitian itu, O'Donnell mempertanyakan tentang karakter atau sifat keterkaitan yang terdapat antara aspek 'Pembangunan ekonomi di satu sisi dengan aspek demokratisasi di sisi lain. Bentuk keterkaitan menjadi kunci pertanyaan yang diajukan oleh O'Donnell, apakah hubungan keterkaitan itu berbentuk linear atau non-linear, sehingga bisa menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan yang demokratis. O'Donnell menghasilkan ternuan-ternuan yang dinilai sebenarnya cukup memukul pendapat-pendapat yang dikembangkan oleh Lipset dan Diamond sebelumnya. Secara tegas O'Donnell mengungkapkan bahwa mayoritas negara-negara di kawasan Amerika Latin yang sudah mencanangkan pembangunan ekonomi sejak 1970-an, ternyata tidak berhasil mencapai atau mewujudkan demokrasi. Masih menurut O'Donnell (1979:74), yang terjadi bukannya dernokrasi, melainkan terciptanya "*bureaucratic-authoritarian regimes.*" Dalam konteks inilah kemudian O'Donnell memandang

perlu menyelidiki tahapan pembangunan yang dijalankan oleh negara bersangkutan sebelum mengarah kepada penciptaan demokrasi. Tahapan pembangunan ini dikategorikannya sebagai bagian dari transisi menuju demokrasi.

Dalam dua artikel yang ditulis oleh Lipset dan rekan yang kemudian diterbitkan pada tahun 1993 dan 1994 terlihat secara jelas adanya aktivitas pengukuran yang memposisikan dimensi pembangunan ekonomi sebagai determinan yang dinilai berpeluang menciptakan demokratisasi. Studi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data-data aktual yang dikeluarkan oleh Freedom House. Variabel demokrasi didasarkan pada susunan ranking sebagaimana yang ditetapkan oleh Freedom House. Secara umum, Lipset dan rekan (1993:158) mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi dan demokratisasi. Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Lipset dan rekan itu, diperoleh penegasan bahwa pembangunan ekonomi adalah faktor yang paling kuat di antara faktor-faktor lain dalam mempengaruhi demokrasi. Mereka mengusulkan bahwa hubungan antara kesejahteraan atau kemakmuran dengan demokrasi dapat dijelaskan melalui penggunaan kurva-N (*N-curve*). Melalui teknik pengukuran seperti ini, Lipset dan rekan menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi berada pada ambang yang kuat dalam mempengaruhi level demokrasi. Intinya, Lipset dan rekan memberikan indikasi bahwa temuan-temuannya ini mendukung apa yang menjadi hipotesis dalam teori-teori modernisasi. Namun demikian, ketika kesimpulan pengukuran itu dihadapkan pada ruang prediksi untuk masa depan, Lipset dan rekan meragukan hasil temuan itu dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi.

Dalam pandangan Lipset dan rekan, faktor ekonomi sebenarnya bukanlah satu-satunya determinan penting yang dianggap kuat mempertajam penciptaan demokrasi di sebuah negara, melainkan ada faktor-faktor lainnya. Terapi diakuinya faktor-faktor lainnya itu bukanlah determinan yang mampu menghasilkan dan mewujudkan demokrasi (Lipset 1994:17). Tesis seperti ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah faktor utama yang dinilai dapat menghasilkan dan mewujudkan terciptanya demokratisasi, selain faktor-faktor lain, seperti budaya politik, tradisi agama, serta kelembagaan sosial yang hidup di sekitar tumbuhnya proses demokratisasi tersebut.

Pola berpikir seperti yang dikembangkan oleh Lipset ini merupakan sesuatu yang sebenarnya identik dengan teori modernisasi. Hampir senada dengan Lipset, Hadenius justru cenderung menempatkan faktor-faktor lain itu dalam arus utama pemikirannya. Dalam laporan indeks demokrasi yang dihasilkannya, terutama pada negara-negara dunia ketiga tahun 1988, Hadenius meyakini bahwa pembangunan ekonomi bukanlah

sesuatu yang tidak penting dalam mendorong terciptanya demokratisasi, tetapi ada faktor-faktor lain yang lebih penting, yaitu faktor melek huruf dan pendidikan. Pandangannya dalam kaitan ini dikemukakannya secara tegas sebagai berikut:

"Yet, it is not primarily the economic factors -which have loomed large in recent research in this field-which are interesting in this context. The crucial point for a political change in the said direction chiefly comprises attributes which pertain to popular education." (Hadenius 1993:90)

Sesuatu yang terkait dengan upaya penciptaan demokrasi dalam sebuah negara, terutama di negara-negara dunia ketiga, sangat bersinggungan dengan aspek pendidikan. Dalam pandangan Hadenius, memberdayakan aspek kependidikan masyarakat merupakan hal utama yang dapat dikategorikan sebagai determinan untuk mewujudkan demokrasi.

Penjelasan Upset dan Hadenius seperti telah diungkapkan di atas merupakan serangkaian aktivitas teoritis yang bertujuan untuk mempertegas tesis bahwa determinan sosial-ekonomi sesungguhnya merupakan faktor yang dinilai dapat mempengaruhi upaya penciptaan sistem yang demokratis di sebuah negara. Pandangan yang berbeda kemudian muncul ketika Muller mempersoalkan operasionalisasi konsep pembangunan ekonomi itu sendiri. Dalam hal ini, Muller menolak pandangan bahwa pembangunan ekonomi dapat secara langsung mempengaruhi demokrasi. Muller meyakini bahwa pembangunan ekonomi tidaklah secara langsung dapat mempengaruhinya, tetapi harus melewati berbagai tahapan lain dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Muller, sebagaimana juga O'Donnell melihat betapa rangkaian tahapan di dalam pembangunan ekonomi itu adalah bagian terpenting untuk melihat secara komprehensif hubungan keterkaitan antara pembangunan ekonomi dengan demokrasi. Dalam hal ini, Muller mengusulkan perlunya faktor perantara untuk menganalisis hal tersebut. Keyakinan ini didapatkannya setelah melalui survei pada kasus-kasus tertentu, seperti yang ia lakukan di Kosta Rika tahun 1995. Perihal *income distribution* adalah indikator yang dinilai oleh Muller sebagai hal penting tadi. Menurutnya tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan sangat kondusif untuk mempengaruhi stabilitas demokrasi. Seterusnya ia menyebutkan bahwa ketidakmerataan pendapatan kemungkinan besar dapat membuat demokrasi menjadi terhambat. Sebagai kesimpulannya, Muller (1995:981) menegaskan bahwa *"high levels of income inequality are incompatible with the development of a stable democratic system."*

Pola berpikir yang hampir sama dengan Muller datang dari Burkhart and Lewis-Beck. Mereka meyakini bahwa kemakmuran dan demokrasi

mempunyai kererkaitan, namun demikian sangat tergantung pada sistem dunia yang melingkupinya. Simaklah seperti yang diungkapkan kedua ahli sebagaimana berikut ini:

"It is clear that development substantially improves a nation's democratic prospects. However, the full magnitude of that effect depends on the location of the nation in the world system. As the nation moves from the core, to the semi periphery, to the periphery, the effect diminishes."
(Burkhart and Lewis-Beck 1994:907)

Sebagaimana Muller, Burkhart dan Lewis-Beck juga menyebarkan adanya faktor perantara yang diyakininya sebagai indikator penting dalam determinan pembangunan ekonomi, yaitu rata sistem dunia. Pandangan lain dapat kita lihat seperti yang dikembangkan oleh Barro. Ahli ini membenarkan bahwa standar hidup yang tinggi dapat dijadikan sebagai faktor untuk mempromosikan demokrasi. Tetapi, menurutnya tidak serta merta mernbuar faktor itu dalam arti sempit yang hanya melihat dimensi ekonomi saja, melainkan ada faktor lainnya, yaitu warisan kolonial dan sistem agama atau keyakinan masing-masing populasi yang hidup di negara bersangkutan (Ba~TOI999:182).

METODOLOGI

Penelitian atas pemahaman demokrasi ini dilakukan dengan menggunakan penelitian mendalam terhadap sejumlah referensi atau kepustakaan yang terkait dengan konsep demokrasi. Penelitian sejenis ini merupakan pekerjaan yang memfokuskan diri pada ketersediaan sejumlah [literatur yang dengan sengaja dieksplorasi, kemudian disisternatisasi, sehingga membentuk sebuah pola pembahasan yang komprehensif. Kekuatan penelitian ini terletak pada sejauh mana peneliti berhasil mengeksplor dan menjelaskan pesan-pesan yang terdapat dalam sejiap literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdebatan konsep demokrasi memang tak kunjung usai, paling tidak itulah yang tergambar dari uraian-uraian di atas. Perdebaran-perdebatan itu sarat dengan argumentasi dan diwarnai dengan munculnya pembenaran-pembenaran yang logis. Terlepas dari perdebatan itu, satu hal yang pasti adalah bahwa 'aksi mempreteli' merupakan ciri khas yang senantiasa melekat sepanjang masa dalam tubuh konsep demokrasi. Dalam bahasa umum aksi semacam ini disebut juga dengan revisi. Inilah yang kemudian membuat demokrasi sesungguhnya tidak pernah sepi dari ruang diskursus

dan tidak pernah menjauh dari sentuhan-sentuhan rasio. Munculnya ragam pandangan atas konsep demokrasi senantiasa bertujuan untuk mendewasakannya dan konsensus penting yang dapat diperoleh dari keragaman pandangan itu adalah bahwa demokrasi mempunyai hubungan kererkaitan dengan dimensi non-polirik. Dimensi-dimensi non-politik ini merupakan serangkaian faktor yang dinilai bermanfaat untuk menemukan, mengenali, dan pada akhirnya menumbuhkan demokrasi.

Seterusnya, uraian di atas menampilkan adanya pembenaran umum yang menyatakan bahwa Faktor-faktor non-polirik yang mencakup dimensi sosial-ekonomi ternyata mempunyai hubungan keterkaitan yang posirif dengan dimensi penciptaan demokrasi. Namun demikian, ketika ragam pandangan-pandangan itu sampai pada tahap berkorespondensi dengan realitas, maka teori demokrasi pun menjadi dipertanyakan atau diperdebatkan kembali. Dari berbagai pandangan tentang demokrasi, sebenarnya teori demokrasi dapat disederhanakan menjadi empat corak, yaitu individualisme, utilitarianisme (atau teori kepentingan), teori hak dan kewajiban, dan kolektivisme demokrasi (Pennock 1979:170). Kemudian, munculnya sejumlah pendirian aras pemahaman teoretis menyangkut demokrasi secara langsung telah pula melahirkan keragaman pandangan atas bentuk-bentuk atau model-model demokrasi.

Satu hal yang pasti adalah bahwa demokrasi tidak dengan mudah bisa tumbuh dan berkembang di negara-negara tertentu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kemudian bermunculan pula ragam pandangan atas demokrasi ketika para ahli telah selesai dengan upaya mengkonstruksikan teorinya. Menurut John Dunn, bagi negara modern demokrasi perwakilan adalah yang paling sesuai (Karim 1998:7). Masih ada beberapa macam demokrasi yang lain. MacPherson, membagi demokrasi menjadi empat jenis, yaitu demokrasi protektif demokrasi pembangunan, demokrasi keseimbangan, dan demokrasi partisipatoris (Karim 1998:7-8). Kemudian, Hasted mengajukan lima corak yang lain (Karim 1998:8), yaitu:

- Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.
- Demokrasi Terpimpin, para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilu yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
- Demokrasi Sosial, yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik,
- Demokrasi Partisipasi, yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.

- Demokrasi Konsosiasional, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat di antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

Seperti telah disinggung di atas, demokrasi bisa berkembang dengan baik jika tersedia faktor-faktor pendukungnya. Dalam arti umum, para pakar sependapat bahwa kapitalismelah yang paling mendukung perkembangan demokrasi, sehingga demokrasi sendiri dipersepsikan sebagai bentuk khas kapitalisme (Rueschemeyer, Stephens, and Stephens 1992:1). Kapitalisme dan demokrasi seringkali disamakan. Dengan begitu demokrasi politik tidak bisa dipisahkan dari liberalisme.

Dalam pandangan yang lain tentang bentuk demokrasi, patut kiranya memperhatikan usulan Lane dan Ersson. Usulan ini berbasis pada hasil survei komparatif yang diselenggarakan oleh kedua ahli ini. Merujuk kepada klasifikasi yang dihasilkan oleh Lane dan Ersson, terdapat kondisi-kondisi atau faktor-faktor yang dinilai memiliki dampak yang kuat untuk menjamin terciptanya sistem demokrasi. Faktor-faktor ini adalah serangkaian variabel yang sering disebut sebagai kondisi-kondisi yang menentukan ke arah terciptanya demokrasi, yakni "*structural conditions, cultural conditions, and institutional conditions*" (Lane and Ersson 2003:82-85). Dalam pandangan Lane dan Ersson, faktor-faktor ekonomi dan sosial masuk dalam kategori *structural conditions*. Kemudian faktor-faktor etnisitas dan agama masuk dalam kategori *cultural conditions* dan terakhir; faktor-faktor yang menyangkut pada *rules* atau tata aturan politik, sosial, dan ekonomi masuk dalam kategori *institutional conditions*. Ketiga kondisi di atas mempunyai sifat yang saling terkait satu sama lain tatkala mempengaruhi variabel kemungkinan demokrasi. Dalam konteks ini, Lane dan Ersson menentukan variabel independen adalah sama dengan *exogenous variables* dan variabel dependen sama dengan *endogenous variables*. Secara jelas Lane dan Ersson mengatakan bahwa "*exogenous is determined from outside of the political system*" dan "*endogenous is determined from inside the political system.*" Model hubungan variabel yang digambarkan oleh Lane dan Ersson ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat model *demokrasi eksogen* dan *demokrasi endogen*. Demokrasi eksogen adalah bentuk demokrasi yang dipengaruhi oleh serangkaian faktor-faktor non-politik yang terdiri dari campuran kondisi-kondisi sosial dan ekonomi, serta budaya (*Exogenous Democracy = Structural Conditions + Cultural Conditions*). Sedangkan demokrasi endogen adalah bentuk demokrasi yang dipengaruhi oleh faktor sistem politik semata (*Endogenous Democracy = Political, Social, and Economic Rules*) (Lane and Ersson 2003:84).

Pandangan Lane dan Ersson yang akhirnya menghasilkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, diakuinya pula sebagai produk yang

sebenarnya masih longgar, artinya tidak tertutup kemungkinan untuk diperdebatkan. Pada bagian akhir dari tulisannya tentang metodologi analisis demokrasi itu, disebutkan bahwa "*no theory can be conclusively falsified or verified is correct, it remains true that the only way to choose between alternative models is to consult empirical findings and spell out their implications for model testing*" (Lane and Ersson 2003:85). Dalam pandangan penulis, hasil kesimpulan yang secara tegas memberikan sesuatu yang baru bagi diskursus demokrasi adalah usul yang patut dihargai dan patut pula memperoleh apresiasi positif. Unsur itu perlu diketahui bahwa kini lahir lagi bentuk demokrasi baru di samping sejumlah bentuk demokrasi lainnya; yaitu demokrasi exogen dan demokrasi endogen. Apa yang diusulkan oleh kedua ahli terakhir ini sesungguhnya hanya ingin menyampaikan bahwa terdapat jalan keluar di tengah perdebatan panjang tentang demokrasi. Jalan keluar itu berusaha mengakomodasi dua golongan besar yang senantiasa berpendirian teguh atas pandangan-pandangannya tentang demokrasi, yakni mereka yang mewakili pandangan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan dan mereka yang mewakili pandangan demokrasi sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar sistem pemerintahan. Lalu di manakah kita memposisikan pendirian sarjana kita masing-masing?

KESIMPULAN

- Bahwa demokrasi adalah *rule by the people*. Kemudian pemahaman dan interpretasi atas dimensi *rule* dan *people* jelas telah menimbulkan keragaman pandangan atas konstruksi konsep demokrasi itu sendiri. Keragaman pandangan itu menjadi mengemuka tatkala gagasan demokrasi berkorespondensi dengan realitas. Ketika bersentuhan dengan ruang empiris tertentu, sistem demokrasi cenderung menjadi tidak tepat, terlebih-lebih bila demokrasi itu dipandang dalam perspektif klasik.
- Bangunan teori demokrasi pun menjadi turut terbawa-bawa ke arah yang bervariasi, oleh karena keragaman sudut pandang tadi. Dalam kondisi yang demikian ini sesungguhnya teori-teori demokrasi adalah serangkaian teori yang spasial. Teori-teori yang sifatnya spasial jelas berpengaruh pada munculnya model atau bentuk-bentuk demokrasi yang beragam. Oleh karena itu, keragaman bentuk demokrasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.
- Perspektif yang beragam, bangunan teori yang beragam, dan bentuk atau model yang beragam, merupakan kalimat-kalimat kunci yang senantiasa melekat erat dalam terminologi sistem demokrasi. Jika demikian halnya maka sangat lumrah bila kemudian demokrasi sesungguhnya memiliki posisi labil untuk diterima secara universal.

Hanya untuk tempat dan ruang serta waktu yang benarlah demokrasi itu dapat diterima dan dijalankan. Sebaliknya, tempat dan ruang serta waktu yang salah hanya akan menjadikan demokrasi itu sia-sia belaka.

- Namun demikian, walaupun demokrasi itu tetap dipaksakan, itu berarti memerlukan serangkaian konsensus demokrasi. Konsensus demokrasi itu memiliki ciri "*relatif tidak sesuai dengan kehendak-kehendak demokrasi, tetapi sesuai dengan kehendak-kehendak di mana ruang demokrasi itu berada.*"

BIBLIOGRAFI

Buku

- Barker, Ernest. 1942. *Reflections on Government*. Oxford: Clarendon Press.
- Barry, Brian. 1989. *Democracy, Power and Justice: Essays in Political Theory*. Oxford: Clarendon Press.
- Bell, Daniel A., David Brown, Kanishka Jayasuria, dan David Martin Jones (ed.). 1995. *Toward Illiberal Democracy in Asia Pacific*. Basingstoke: Macmillan.
- Bryce, James. 1921. *Modern Democracies*. London: Macmillan.
- Christophersen, Jens A. 1968. *The Meaning of Democracy as Used in European Ideologies from the French to the Russian Revolution: An Historical Study in Political Language*. Oslo: Universitetsforlaget.
- Collins, Randall. 1998. "Democratization in World Historical Perspective". Dalam *Max Weber, Democracy and Modernization*, disunting oleh Ralph Schroeder. Basingstoke: Macmillan.
- Dahl, Robert A. 1963. *A Preface to Democratic Theory*. Chicago: The University of Chicago Press.
- . 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Dewey, John. 1966. *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Free Press.
- Hadenius, Alex. 1992. *Democracy and Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Lane, Jan-Erick dan Svante Ersson. 2003. *Democracy: A Comparative Approach*. London: Routledge.
- Laski, Harold J. 1931. "Democracy." Dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences*. Volume 5. London: Macmillan
- Upset, Seymour Martin. 1963. *Political Man*. London: Mercury Books.

- , 1995. *The Encyclopedia of Democracy*. Volume 1. London: Routledge.
- Lively, Jack. 1962. *The Social and Political Thought of Alexis de Tocqueville*. Oxford: Clarendon Press.
- Lively, Jack. 1975. *Democracy*. Oxford: Basil Blackwell
- MacIver, R.M. 1965. *The Web of Government*. New York: The Free Press.
- MacPherson, C.B. 1972. *The Real World of Democracy*. New York: Oxford University Press.
- MacPherson, C.B. 1973. *Democratic Theory; Essays in Retrieval*. Oxford: Clarendon Press.
- Mayo, H.B. 1965. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Naess, Arne, Jens A. Christophersen dan Kjell Kvalo. 1956. *Democracy, Ideology and Objectivity: Studies in Semantics and Cognitive Analysis of Ideological Controversy*. Oslo: Universitetsforlaget.
- O'Donnell, Guillermo A. 1979. *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics*. Berkeley: Institute of International Studies.
- Pennock, J Rolland. 1979. *Democratic Political Theory*. Princeton: Princeton University Press.
- Pickles, Dorothy. 1970. *Democracy*. New York: Basic Books.
- Przeworski, Adam. 1999. "Minimalist Conception of Democracy: A Defense." Dalam *Democracy's Values*, disunting oleh Ian Shapiro dan Casiano Hacker-Cordon. Cambridge: Cambridge University Press.
- Przeworski, Adam, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub dan Fernando Limongi. 2000. *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World 1950-1990*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rueschemeyer, Dietrich, E.H. Stephens dan J.D. Stephens. 1992. *Capitalist Development and Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Sartori, Giovanni. 1987. *The Theory of Democracy Revisited: The Contemporary Debate*. Part 1. New Jersey: Catham House Publishers.

Artikel dan Jurnal

- Barro, Robert J. 1999. "Determinants of Democracy." *Journal of Political Economy* Vol 107.
- Bollen, Kenneth A. 1990. "Political Democracy: Conceptual and Measurement Traps." *Studies in Comparative International Development* Vol. 25.

- Burkhart, Ross E. dan Michael S. Lewis-Beck. 1994. "Comparative Democracy: The Economics Development Thesis." *American Political Science Review* Vol. 88.
- Diamond, Larry. 1992. "Economic Development and Democracy Revisited." *American Behavioral Scientist* Vol. 35.
- Elkins, Zachary. 2000. "Gradation of Democracy; Empirical Test of Alternative Conceptualizations." *American Journal of Political Science* Vol. 44.
- Karim, M. Rusli. 1998. "Peluang dan Hambatan Demokratisasi." *Analisis CSIS*, Tahun XXVI, No.1, januari-Maret 1998.
- Lijphart, Arendt. 1996. "The Puzzle of Indian Democracy: A Consociational Interpretation." *American Political Science Review* Vol. 90.
- Upset, Seymour Martin, Kyoung-Ryung Seong dan John Charles Torres. 1993. "A Comparative Analysis of the Social Requisites of Democracy." *International Social Science Journal* Vol, 45(2).
- Lipset, Seymour Martin. 1994. "The Social Requisites of Democracy Revisited." *American Sociological Review* Vol. 59.
- Markoff, John. 1999. "Where and when was democracy invented?" *Comparative Studies in Society and History* Vol. 41.
- Muller, Edward N. 1995. "Economic Determinants of Democracy." *American Sociological Review* Vol. 60.
- Varshney, Ashtosh. 1999. "Democracy and Poverty." *Background Paper for the 2000/2001 World Development Report on Poverty*. Washington DC: The World Bank.
- Vanhanen, Tatu. 2000. "A New Dataset for Measuring Democracy 1810-1998." *Journal of Peace Research* Vol. 37.

Sumber Online

- Gurr, Ted Robert dan Keith Jagers. 2000. "Polity 98 Project: Regime Characteristics 1800-1998." (<http://www.bsos.umd.edu/cidcm/polity1>)